

Intisari

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dinilai dengan tegaknya penegakan hukum, dan peraturan perundang-undangan memiliki peran yang besar dalam hal ini. Peraturan perundang-undangan dapat mengalami perubahan, sehingga berpengaruh bagi pelaksanaan kegiatan terkait. Perubahan atas peraturan perundang-undangan tersebut juga terjadi pada lingkup pendidikan tinggi, khususnya terkait dosen. Atas dasar ini diperlukan adanya sistem yang dapat membantu civitas akademika dalam memahami hierarki perubahan, juga membantu dalam pemahaman atas peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi terkait dosen. Hal ini diharapkan dapat membantu civitas akademika dalam menaati sistem birokrasi yang ada, juga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akademik.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan knowledge management berbasis ontologi pada peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi terkait dosen sebagai solusi teknologi untuk menghadapi permasalahan dalam pemahaman peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi terkait dosen. Dengan sistem ontologi, knowledge management yang dikembangkan diharapkan mempermudah pemahaman atas peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi terkait dosen.

Hasil dari penelitian ini adalah model ontologi peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi terkait dosen dalam aplikasi Protege 4.3. Sistem yang dirancang menggunakan 3 kelas yaitu PeraturanPerundangundangan untuk peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi terkait dosen dengan 15 instances, Pasal untuk pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan dengan 334 instances, dan Topik untuk topik yang berkaitan dengan pasal-pasal yang ada dengan 21 instances. Sistem dilengkapi dengan 21 rules untuk merelasikan pasal dengan topik yang sesuai, juga dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan SPARQL. Model ontologi yang dihasilkan dapat menampilkan hierarki perubahan perundang-undangan, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, juga pasal-pasal yang sesuai atas topik-topik tertentu.

Kata kunci : knowledge management, ontologi, peraturan perundang-undangan, pendidikan tinggi

Abstract

Good governance can be seen with the law enforcement, and legislation has a major role in this regard. Legislation may change, changes of the legislation would be influential for the implementation of the activities related with. Changes of the legislation also occur in the scope of higher education, particularly related to the lecturer. For this reason, we need a system that can help academic community to understand the hierarchy of legislation's changes, as well as an understanding of higher education legislation. An understanding of the legislation is expected to help academics in keeping the existing bureaucratic system, also in the planning and implementation of academic activities in general.

This research aims to develop an ontology of knowledge management based on higher education legislation, regarding lecturers, as a technology solutions for dealing with problems in understanding higher education legislation. With the ontology system, the developed knowledge management is expected to make understanding on higher education legislation easier.

The results of this study are an ontology model of higher education legislation regarding lecturers in Protege 4.3 applications. The designed system used three classes, namely PeraturanPerundangundangan for higher education legislation focusing in lecturers with 15 instances, Pasal for the sections of the legislation with 334 instances, and Topik for the topics related with existing sections with 21 instances. The system is equipped with 21 rules to relate the topic with the corresponding section, also can be tested by using SPARQL. The resulting ontology model can display the hierarchy of legislative changes, the relationship among regulations, as well as the corresponding sections on specific topics.

Keywords : *knowledge management, ontology, legislation, higher education*